

**KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG KEORMASAN  
TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister**

**Program Studi Magister Hukum**



**Diajukan oleh  
ANDHI SETYA BUDI  
2014-02-002**

**Kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2018**

**TESIS**  
**KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG KEORMASAN**  
**TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI**  
**DI INDONESIA**

Disusun oleh  
**ANDHI SETYA BUDI**  
**2014-02-002**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 5 September 2018

**Susunan Dewan Penguji**

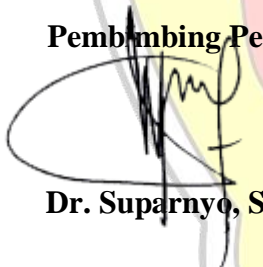
**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Subarkah, S.H., M.Hum.**


**Anggota Dewan Penguji I**

  
**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Suparno, S.H., M.S.**

**Anggota Dewan Penguji II**

  
**Suciningtyas, S.H., M.Hum.**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 5 September 2018



**Hidayatullah, S.H., M.Hum.**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhi Setya Budi

NIM : 2014-02-002

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 5 September 2018

Yang membuat pernyataan

Andhi Setya Budi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Subarkah, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan dan saran pada seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan tesis.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. beserta segenap sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, motivasi dan semangat untuk terus menimba ilmu.



5. Ayahanda H. Hambali yang tiada henti untuk selalu mendoakan.
6. Kekasih yang setia mendampingi dengan cinta.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selalu kompak dan saling menguatkan, yang membuat suasana perkuliahan semakin menyenangkan dan akan selalu dirindukan.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kudus, September 2018

Andhi Setya Budi

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Abstract .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
a. Tujuan Umum .....	11
b. Tujuan Khusus .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
a. Manfaat Teoritis .....	12
b. Manfaat Praktis .....	12
D. Metode Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16

A. Tinjauan Teori Hukum .....	16
1. Teori <i>Stufenbau</i> .....	18
2. Teori Hukum Kritis .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	21
1. Pengertian Organisasi .....	21
2. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan .....	23
C. Tinjauan Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	29
D. Tinjauan Tentang Demokrasi .....	32
1. Pengertian Demokrasi .....	32
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia .....	41
B. Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul: Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Penetapan Perppu oleh Presiden hanya boleh dilakukan ketika dalam kondisi ihkwal kegentingan yang memaksa. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada sidang paripurna DPR, DPR menyetujui Perppu tersebut dan mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Akibat Perppu tersebut, terjadi kegaduhan di Masyarakat yang sebagian menganggap bahwa Perppu tersebut menciderai nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan undang-undang keormasan terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia? 2. Bagaimana dimensi kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter, metode analisisnya menggunakan metode kualitatif.

Pada undang-undang keormasan sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan, mekanisme pembubaran ormas adalah melalui putusan pengadilan. Namun, setelah ditetapkannya Perppu tersebut, Kementrian terkait dapat mencabut status badan hukum dari ormas, yang sama saja membubarkannya. Hal ini berdasarkan asas *contrario actus*. Hal ihkwal kegentingan yang memaksa yang melatarbelakangi ditetapkannya Perppu tersebut karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan ormas yang mengancam ideologi Pancasila yang harus segera ditindaklanjuti. Namun batasan tentang ancaman terhadap ideologi Pancasila perlu diperjelas agar tidak menjadi polemik dalam Pemerintah mengambil tindakan kepada ormas yang dianggap mengancam ideologi Pancasila. Disamping itu tindakan preventif lebih penting dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas-ormas sebelum menjatuhkan sanksi berupa pencabutan status badan hukum.

Kata Kunci : Demokrasi, Organisasi Kemasyarakatan, Perppu.



## ABSTRACT

This thesis is entitled: The Position of the Normality Law Against the Life of Democracy in Indonesia. The Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the President has the right to stipulate a Government Regulation in Lieu of Law. Determination of the Perppu by the President may only be done when in conditions of forced urgency. In 2017, President Joko Widodo established Perppu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. At the DPR plenary session, the House of Representatives approved the Perppu and passed Law Number 16 of 2017. As a result of the Perppu, there was a commotion in the Community which partly considered that the Perppu was injuring democratic values in Indonesia.

The problems discussed in this thesis are: 1. How is the status of normative laws on democratic life in Indonesia? 2. How does the dimensions of urgency force in the stipulation of Perppu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations? The problem approach in this study is normative juridical approach, the specification of this study is descriptive analytical, the type of data used is secondary data, methods of data collection by means of literature study and documentary study, the method of analysis uses qualitative methods.

In the normative law before the Perppu Number 2 of 2017 is stipulated, the mechanism for dissolution of mass organizations is through a court decision. However, after the stipulation of the Perppu, the relevant Ministry can revoke the legal entity status of the mass organization, which is the same as dissolving it. This is based on the principle of *contrario actus*. The matter of coercive urgency underlying the stipulation of the Perppu is because Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations has been unable to fulfill the current legal requirements. Especially those related to mass organizations that threaten the ideology of Pancasila which must be followed up immediately. But the limitation of the threat to the Pancasila ideology needs to be clarified so as not to become a polemic in the Government taking action on mass organizations that are considered threatening the Pancasila ideology. Besides that, preventive action is more important by conducting guidance and supervision of mass organizations before imposing sanctions in the form of revocation of legal entity status.

Keywords: Democracy, Community Organization, Perppu.